



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU		.....

**JUMAT, 24 AGUSTUS 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Kajari Baru , Kasus DPPKAD Berlanjut**

RBI, BENGKULU - Kendati Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu diganti oleh Emilwan Ridwan SH, kasus dugaan tindak pidana penyelenggaraan dana Beban Kerja (BK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu tahun 2015 tetap berlanjut. Hal itu diungkapkan Kasi Pidsus, Oktalian SH hingga saat ini proses penanganan perkara tersebut sudah disampaikan dengan Kajari baru, dan kasus yang diduga telah merugikan negara tersebut dipastikan berlanjut.

"Ya, kita pastikan berlanjut untuk penanganan perkara dugaan korupsi dalam pengucuran dana BK pada DPPKAD Kota ini," ucap Oktalian saat dihubungi RBI melalui telepon seluler Kamis, (23/8).

Diakuinya, sejauh ini untuk penetapan orang yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini, seperti yang telah diungkapkannya sebelumnya, bahwa pihaknya masih menunggu saksi ahli dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara untuk proses pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut, untuk sementara ini sudah dinyatakan cukup, demikian juga dengan barang bukti.

"Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan barang bukti yang ada, tim penyidik sudah ada kesimpulan untuk tindak lanjut kasus tersebut. Namun yang masih menjadi penghalang saat ini yaitu saksi ahli, yang kita minta dari Kemendagri, kita masih menunggu itu," ucap Ok-

talian. Untuk diketahui, pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 diduga menyalahi aturan perwal nomor 36. Sesuai dengan perwal nomor 12 tahun 2014 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, kemudian pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta, Jabatan sekretaris dan Kabid pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta, di tahun 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 5 juta. Jabatan bendahara ditahun 2014 menerima dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 menjadi Rp 4,5 juta.

Staf ASN tahun 2014 menerima dana BK Rp 1,5 juta, ditahun 2015 Rp 3,5 juta, dan honorer pada tahun 2014 menerima dana BK Rp 1 juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 3 juta. Dana BK yang harus dikembalikan ASN dan honorer yang menerima dana BK itu adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pembayaran hanya berlangsung dua bulan, tetapi di dalam tanda-tangan penerimaan, ASN dan honorer tersebut harus tanda-tangan menerima tunjangan selama 7 bulan. Total semua anggaran Rp 1,8 Miliar Rp 200 Juta digunakan untuk membayar dana BK. Sesuai dengan penjelasan M Sofyan mantan kepala DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015. Dari sisa anggaran Rp 1,6 kemudian Rp 500 Juta diduga digunakan untuk kasus lain. (ide)